



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-143.01-0/2025**



DS:6280-1245-1302-0261

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.01 SEKRETARIAT JENDERAL |
| 3. PAGU | : | Rp.501.518.169.000 |
- (LIMA RATUS SATU MILIAR LIMA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

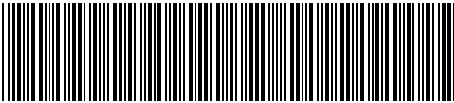
- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.01-0/2025



DS:6280-1245-1302-0261

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	:	01	SEKRETARIAT JENDERAL
3. PAGU	:	Rp.501.518.169.000	
(LIMA RATUS SATU MILIAR LIMA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)			

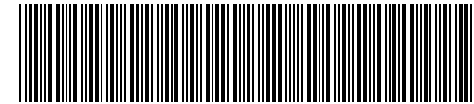
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	:	143.01.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	36.417.435
		143.01.WA	Program Dukungan Manajemen	465.100.734
2. SASARAN STRATEGIS K/L	:	01	Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan	
	:	02	Meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari	
	:	03	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa didalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara	
	:	04	Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak	
3. FUNGSI	:	04	EKONOMI	501.518.169
SUB FUNGSI	:	0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	501.518.169
4. PRIORITAS NASIONAL	:	02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	13.735.003
NON PRIORITAS NASIONAL	:			487.783.166



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.01-0/2025



DS:6280-1245-1302-0261

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 4

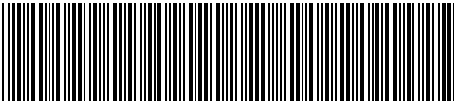
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
143.01.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		36.417.435
SP03	Meningkatkan konservasi sumber daya air		
IKP01	NSPK Kebijakan untuk penurunan bencana hidrometeorologi	1 NSPK	
SP05	Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi hasil hutan		
IKP03	NSPK Kebijakan untuk peningkatan produktifitas dan hilirisasi kehutanan	45 NSPK	
7259	Standardisasi Instrumen Kehutanan		21.849.932
	01.01 Standar Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan, produk kehutanan, kegiatan perhutanan sosial	45 NSPK	
7260	Pengembangan Bioteknologi, Pemuliaan Tanaman Hutan dan Lab, Kehutanan		3.947.503
	01.01 Rancangan kebijakan Pengembangan Bioteknologi, Pemuliaan Tanaman Hutan dan Lab kehutanan	1 Kebijakan	
7261	Pengembangan Ketahanan Bencana Hidrometeorologi		1.770.000
	01.01 Kebijakan untuk ketahanan bencana hidrometeorologi	1 NSPK	
7262	Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan		6.850.000
	01.01 Layanan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan	354 Lembaga	
7263	Pengembangan Hutan Tropis		2.000.000
	01.01 Rancangan kebijakan pengembangan hutan tropis	1 Kebijakan	
143.01.WA	Program Dukungan Manajemen		465.100.734
SP01	Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien		
IKP01	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kehutanan	80 Poin	
IKP02	Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan	WTP WTP	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.01-0/2025



DS:6280-1245-1302-0261

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

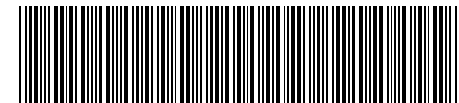
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
IKP03	Indeks Pelayanan Publik	3,51 Poin	
IKP04	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Kehutanan	80 Poin	
IKP05	Nilai Indeks Sistem Merit	465 Poin	
IKP06	Nilai Indeks Reformasi Hukum	70 Poin	
IKP07	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	3,7 Poin	
IKP08	Indeks Kualitas Kebijakan	75 Poin	
IKP09	Standar deviasi realisasi terhadap perencanaan pengembangan kerjasama luar negeri	20 Persen	
7302	Penyelenggaraan Data dan Informasi Kehutanan		80.421.342
	01.01 Data dan informasi Kehutanan	4 Dokumen	
	01.02 Tingkat kepuasan layanan data dan sistem informasi kehutanan	4 Poin	
	01.03 Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	3,7 Poin	
7304	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Kehutanan		380.378.255
	01.01 Tingkat kepuasan layanan perizinan Kementerian Kehutanan	4 Poin	
7309	Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Kehutanan		2.117.958
	01.01 Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis	6 Dokumen	
7310	Penyelenggaraan Keteknikan Kehutanan		2.183.179
	01.01 NSPK Keteknikan Bidang Kehutanan dan Penerapannya	2 NSPK	



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-143.02-0/2025**



DS:0569-8079-2217-6320

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.02 INSPEKTORAT JENDERAL |
| 3. PAGU | : | Rp.48.711.229.000 |
- (EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR TUJUH RATUS SEBELAS JUTA DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

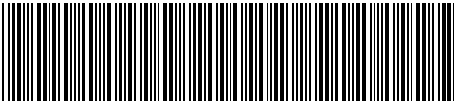
- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.02-0/2025



DS:0569-8079-2217-6320

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

143

KEMENTERIAN KEHUTANAN

2. UNIT ORGANISASI

:

02

INSPEKTORAT JENDERAL

3. PAGU

:

Rp.48.711.229.000

(EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR TUJUH RATUS SEBELAS JUTA DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM

:

143.02.WA

Program Dukungan Manajemen

48.711.229

2. SASARAN STRATEGIS K/L

:

01

Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan

:

02

Meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari

:

03

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa didalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara

:

04

Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak

3. FUNGSI

:

04

EKONOMI

48.711.229

SUB FUNGSI

:

0403

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

48.711.229

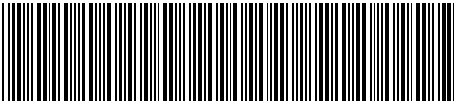
4. NON PRIORITAS NASIONAL

:

48.711.229



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.02-0/2025



DS:0569-8079-2217-6320

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
143.02.WA	Program Dukungan Manajemen		48.711.229
SP01	Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien		
IKP10	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	3,9 Poin	
IKP11	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan	3,8 Poin	
7311	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan		37.141.778
01.01	Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	83,36 Poin	
02.01	Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal	4,4 Poin	
03.01	Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	4,05 Poin	
7312	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan		9.482.235
01.01	persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9	20 Persen	
02.01	Rata-rata Skor Elemen Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP	3,80 Poin	
02.02	Persentase Pengawasan program yang dilakukan secara kontinu	75 Persen	
7313	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN		2.087.216
01.01	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 Persen	
01.02	Persentase Kumulatif Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi	20 Persen	

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

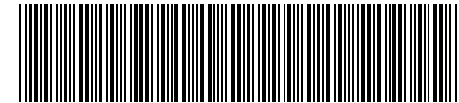
Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Kehutanan



Raja Juli Antoni, Ph.D



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-143.03-0/2025**



DS:1097-8660-8849-7210

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.03 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN |
| 3. PAGU | : | Rp.590.321.695.000 |
- (LIMA RATUS SEMBILAN PULUH MILIAR TIGA RATUS DUA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

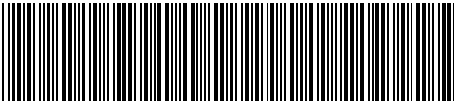
- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.03-0/2025



DS:1097-8660-8849-7210

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :				
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN	
2. UNIT ORGANISASI	:	03	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN	
3. PAGU	:	Rp.590.321.695.000		
(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH MILIAR TIGA RATUS DUA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)				
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :				(dalam ribuan rupiah)
1. PROGRAM	:	143.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	338.390.971
		143.03.WA	Program Dukungan Manajemen	251.930.724
2. SASARAN STRATEGIS K/L	:	01	Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan	
	:	02	Meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari	
	:	03	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa didalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara	
	:	04	Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak	
3. FUNGSI	:	04	EKONOMI	590.321.695
SUB FUNGSI	:	0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	590.321.695
4. PRIORITAS NASIONAL	:	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	239.237.874
NON PRIORITAS NASIONAL	:			351.083.821



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.03-0/2025



DS:1097-8660-8849-7210

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 3

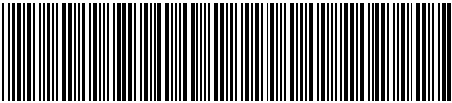
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
143.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		338.390.971
SP01	Menurunkan emisi GRK dari Sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon		
IKP01	Persentase emisi GRK dari sektor kehutanan	55,38 %	
SP08	Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan		
IKP02	Nilai PNBP SDA Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)	2,3 triliun rupiah	
SP09	Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan		
IKP01	Luas kawasan hutan legal dan legitimate	125 Juta Hektar	
SP10	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA		
IKP01	Luas hutan yang dilepaskan untuk TORA	118,472 Ribu Hektar	
7264	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan		40.350.000
	01.01 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	6 Laporan	
	01.02 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	365 Klaster	
	02.01 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik Kehutanan	1 Laporan	
7265	Penatagunaan Kawasan Hutan		600.000
	01.01 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	50 Dokumen	
7266	Penguatan Kawasan Hutan		239.237.874
	01.01 Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan	125 Juta Hektar	
	01.02 Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	4778 KM	
	01.03 Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	12 Dokumen	
	02.01 Luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	118,472 Ribu Hektar	
	02.02 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	20 Provinsi	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.03-0/2025



DS:1097-8660-8849-7210

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :			(dalam ribuan rupiah)
KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
7267	Perencanaan Kawasan Hutan		14.243.900
	01.01 Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi	534 Peta	
	01.02 Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras	25 Dokumen	
	02.01 Penetapan atau perubahan Peta Sumber Daya Hutan (PIAPS), KHDTK, KHKP, KHDPK	4 Peta	
7268	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		43.959.197
	01.01 Jumlah penerimaan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan	2,3 triliun rupiah	
	01.02 Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	700 Unit	
	01.03 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	273 Unit	
143.03.WA	Program Dukungan Manajemen		251.930.724
SP01	Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien		
7314	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan		251.930.724
	01.01 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	80 Poin	
	02.01 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	4,708 Poin	

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Kehutanan



Raja Juli Antoni, Ph.D



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-143.04-0/2025**



DS:2455-0000-2790-2611

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.04 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM |
| 3. PAGU | : | Rp.1.571.733.697.000 |
- (SATU TRILIUN LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

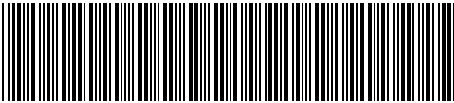
- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.04-0/2025



DS:2455-0000-2790-2611

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	:	04	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
3. PAGU	:	Rp.1.571.733.697.000 (SATU TRIILIUN LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)	

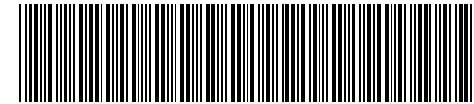
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	:	143.04.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	293.251.984
		143.04.WA	Program Dukungan Manajemen	1.278.481.713
2. SASARAN STRATEGIS K/L	:	01	Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan	
	:	02	Meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari	
	:	03	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa didalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara	
	:	04	Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak	
3. FUNGSI	:	04	EKONOMI	1.278.481.713
SUB FUNGSI	:	0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	1.278.481.713
FUNGSI	:	05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	293.251.984
SUB FUNGSI	:	0504	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	293.251.984
4. PRIORITAS NASIONAL	:	02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	67.258.398
NON PRIORITAS NASIONAL	:			1.504.475.299



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.04-0/2025



DS:2455-0000-2790-2611

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 4

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
143.04.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		293.251.984
SP04	Meningkatkan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya		
IKP01	Jumlah Unit KSA, KPA, dan TB Dengan Kategori Pengelolaan Efektif	304 Unit	
IKP02	Luas ekosistem terdegradasi yang dipulihkan	20000 Hektar	
IKP03	Jumlah Individu Penyelamatan TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar)	30000 Individu	
IKP04	Jumlah Spesies yang terasement secara nasional status keterancamannya berdasarkan IUCN redlist	5 Spesies	
IKP05	Luas KSA, KPA, TB dan Areal Preservasi	528000 Hektar	
SP07	Meningkatkan nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan		
IKP01	Nilai ekspor tumbuhan, satwa liar, dan bioprospecting	7,75 triliun rupiah	
SP08	Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan		
IKP03	Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan	200 Miliar Rupiah	
IKP04	Nilai PNBP dari pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar berkelanjutan	30 Miliar Rupiah	
SP12	Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan		
IKP03	Nilai transaksi ekonomi kelompok pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi	200 Miliar Rupiah	
7269	Konservasi Spesies dan Genetik		67.258.398
01.01	Jumlah penyelamatan tumbuhan dan satwa liar	30000 Individu	
02.01	Jumlah data dan informasi keterancaman spesies	5 Spesies	
03.01	Jumlah entitas pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar	265 Entitas	
03.02	Jumlah komoditi bioprospeksi pada tahap komersialisasi produk	10 Komoditi	
7270	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru		36.800.000
01.01	Luas Kawasan Hutan Konservasi untuk Implementasi Nilai Ekonomi Karbon	100000 Hektar	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.04-0/2025



DS:2455-0000-2790-2611

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 4

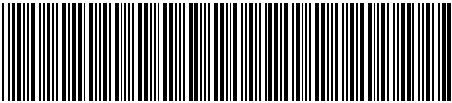
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
7271	01.02 Jumlah Fasilitas pemanfaatan jasa lingkungan	62	Dokumen	42.811.602
	01.03 Jumlah masyarakat yang meningkat kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan	80000	Orang	
	01.04 Jumlah Jasa Lingkungan Wisata Alam yang ditingkatkan pemanfaatannya	13	Unit	
	Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi			
7272	01.01 Luas ekosistem yang dipulihkan	20000	Hektar	29.000.000
	02.01 Luas Area Preservasi yang dikembangkan	528000	Hektar	
	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati			
	01.01 Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan	40	Unit Kawasan Konservasi	
7273	01.02 Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	80	Dokumen Kerjasama	117.381.984
	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru			
	01.01 Penurunan Rata-rata luas kebakaran di KSA, KPA, dan TB	28000	Hektar	
	01.02 Jumlah Unit Kawasan Suaka Alam (KSA), dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB) yang dinilai efektivitas pengelolaannya	286	Unit	
	01.03 Luas Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB terverifikasi	15000	Hektar	
	01.04 Peningkatan Jangkauan Patroli Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB)	500000	Hektar	
	02.01 Jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	500	Orang	
	02.02 Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina	200	Kelompok Masyarakat	
143.04.WA	Program Dukungan Manajemen			1.278.481.713



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.04-0/2025



DS:2455-0000-2790-2611

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
SP01	Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien		
7315	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem		1.278.481.713
01.01	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	78 Poin	
02.01	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	4,345 Poin	

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Kehutanan



Raja Juli Antoni, Ph.D



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-143.05-0/2025**



DS:4818-8915-5679-4043

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.05 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN |
| 3. PAGU | : | Rp.1.002.352.408.000 |
- (SATU TRILIUN DUA MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

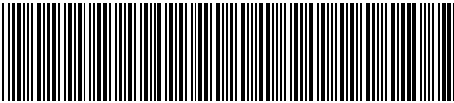
- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.05-0/2025



DS:4818-8915-5679-4043

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	:	05	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN
3. PAGU	:	Rp.1.002.352.408.000 (SATU TRILIUN DUA MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)	

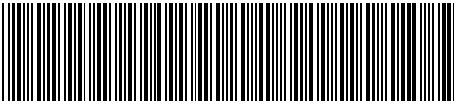
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	:	143.05.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	630.518.585
		143.05.WA	Program Dukungan Manajemen	371.833.823
2. SASARAN STRATEGIS K/L	:	01	Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan	
	:	02	Meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari	
	:	03	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa didalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara	
	:	04	Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak	
3. FUNGSI	:	04	EKONOMI	371.833.823
SUB FUNGSI	:	0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	371.833.823
FUNGSI	:	05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	630.518.585
SUB FUNGSI	:	0504	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	630.518.585
4. PRIORITAS NASIONAL	:	02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	627.768.585
NON PRIORITAS NASIONAL	:			374.583.823



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.05-0/2025



DS:4818-8915-5679-4043

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :				(dalam ribuan rupiah)
KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
143.05.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			630.518.585
SP02	Meningkatkan luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi			
IKP01	Luas rehabilitasi hutan dan lahan		3800 Hektar	
SP03	Meningkatkan konservasi sumber daya air			
IKP02	Luas rehabilitasi pada imbuhan mata air		100 Hektar	
7276	Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai			630.518.585
01.01	Jumlah Data dan Informasi Kinerja DAS		34 Data dan Informasi	
01.02	Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya		34 Lembaga	
143.05.WA	Program Dukungan Manajemen			371.833.823
SP01	Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien			
7316	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan			371.833.823
01.01	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan		78 Poin	
02.01	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan		4,461 poin	

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Kehutanan



Raja Juli Antoni, Ph.D



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-143.06-0/2025**



DS:1390-8529-0164-9514

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.06 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI |
| 3. PAGU | : | Rp.293.919.073.000 |
- (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN BELAS JUTA TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

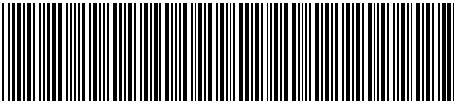
- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.06-0/2025



DS:1390-8529-0164-9514

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	:	06	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
3. PAGU	:	Rp.293.919.073.000 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN BELAS JUTA TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH)	

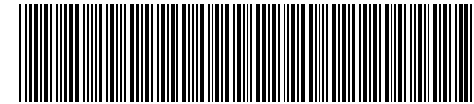
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	:	143.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	99.461.052
		143.06.WA	Program Dukungan Manajemen	194.458.021
2. SASARAN STRATEGIS K/L	:	01	Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan	
	:	02	Meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari	
	:	03	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa didalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara	
	:	04	Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak	
3. FUNGSI	:	04	EKONOMI	293.919.073
SUB FUNGSI	:	0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	293.919.073
4. NON PRIORITAS NASIONAL	:			293.919.073



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.06-0/2025



DS:1390-8529-0164-9514

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 4

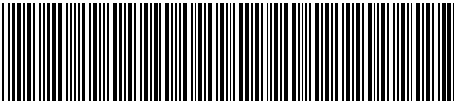
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
143.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		99.461.052
SP02	Meningkatkan luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi		
IKP02	Luas Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan pada area PBPH	428000 Hektar	
SP05	Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi hasil hutan		
IKP01	Efektivitas pengelolaan KPH di Hutan Produksi dan Hutan Lindung	20 KPH	
IKP02	Produksi hasil hutan	55000000 Meter Kubik	
SP06	Meningkatkan ekspor produk hasil hutan		
IKP01	Nilai ekspor kayu dan HHBK	10500000 USD\$	
SP08	Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan		
IKP01	Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan	2,5 triliun rupiah	
SP11	Meningkatkan pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata		
IKP02	Luas Pemanfaatan Hutan skema kemitraan konsesi	16000 Hektar	
SP12	Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan		
7279	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		20.011.952
01.01	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan	20 KPH	
01.02	Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari	20 KPH	
7280	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		11.355.000
01.01	Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan	30 Unit	
01.02	Nilai Investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutan	107000000 USD\$	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.06-0/2025



DS:1390-8529-0164-9514

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
7281	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			23.500.000
	01.01 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	428000	Hektar	
	02.01 Produksi Kayu Bulat	55000000	M3	
	03.01 Produksi Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu	500000	Ton	
	04.03 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat melalui kemitraan konsesi	16000	Hektar	
	05.01 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat melalui kemitraan konsesi	16000	Hektar	
7282	Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan			13.994.100
	01.01 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (WB)	295	Wajib Bayar	
	01.02 Perizinan berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	295	Unit	
7283	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan			30.600.000
	01.01 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat VLK	48000000	M3	
	02.01 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah dan Besar	150	Unit	
	03.01 Ekspor produk olahan hasil hutan	17000000	Ton	
	03.02 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ pemilikan SVLK	100	UMKM	
143.06.WA	Program Dukungan Manajemen			194.458.021
SP01	Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien			
7317	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari			194.458.021
	01.01 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	82	Poin	
	02.01 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	4,708	Poin	

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Kehutanan

Raja Juli Antoni, Ph.D.



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-143.07-0/2025**



DS:0033-8222-3783-5009

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

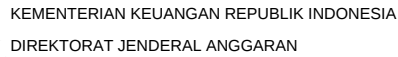
- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.07 DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL |
| 3. PAGU | : | Rp.268.417.980.000 |
- (DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS TUJUH BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

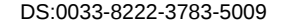
- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM



Halaman : 1 dari 2

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	:	07	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
3. PAGU	:	Rp.268.417.980.000	
(DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS TUJUH BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)			

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	:	143.07.WA	Program Dukungan Manajemen	268.417.980
2. SASARAN STRATEGIS K/L	:	01	Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan	
	:	02	Meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari	
	:	03	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa didalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara	
	:	04	Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak	
3. FUNGSI	:	04	EKONOMI	268.417.980
SUB FUNGSI	:	0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	268.417.980
4. NON PRIORITAS NASIONAL	:			268.417.980

(dalam ribuan rupiah)

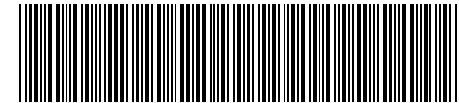
KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
143.07.WA	Program Dukungan Manajemen			268.417.980
SP01	Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien			
7318	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial			268.417.980
01.01	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial	74	Poin	
02.01	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial	4,768	Poin	

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Kehutanan

Raja Juli Antoni, Ph.D



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-143.08-0/2025**



DS:6978-5038-8192-0061

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.08 DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN |
| 3. PAGU | : | Rp.576.150.921.000 |
- (LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR SERATUS LIMA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

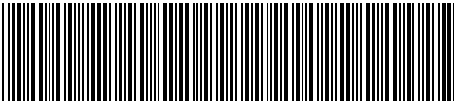
- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.08-0/2025



DS:6978-5038-8192-0061

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	:	08	DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN
3. PAGU	:	Rp.576.150.921.000 (LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR SERATUS LIMA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH)	

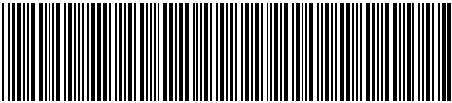
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	:	143.08.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	136.058.341
		143.08.WA	Program Dukungan Manajemen	440.092.580
2. SASARAN STRATEGIS K/L	:	01	Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan	
	:	02	Meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari	
	:	03	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa didalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara	
	:	04	Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak	
3. FUNGSI	:	04	EKONOMI	576.150.921
SUB FUNGSI	:	0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	576.150.921
4. PRIORITAS NASIONAL	:	02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	136.058.341
NON PRIORITAS NASIONAL	:			440.092.580



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.08-0/2025



DS:6978-5038-8192-0061

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :				(dalam ribuan rupiah)
KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
143.08.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			136.058.341
SP01	Menurunkan emisi GRK dari Sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon			
IKP02	Luas kawasan hutan yang dilindungi dari gangguan keamanan dan kebakaran hutan		1,2 Juta Hektar	
SP10	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA			
7292	Penindakan Pidana Kehutanan			136.058.341
01.01	Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Hukum Kehutanan		20 Operasi	
01.02	Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan		25 Perkara	
143.08.WA	Program Dukungan Manajemen			440.092.580
SP01	Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien			
7319	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan			440.092.580
01.01	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan		78 Poin	
02.01	Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan		4,563 Poin	

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

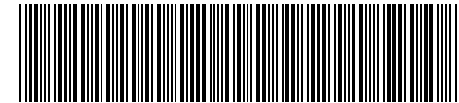
Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Kehutanan



Raja Juli Antoni, Ph.D.



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-143.11-0/2025**



DS:7655-5439-0778-6753

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 143 KEMENTERIAN KEHUTANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 143.11 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 3. PAGU | : | Rp.305.383.366.000 |
- (TIGA RATUS LIMA MILIAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

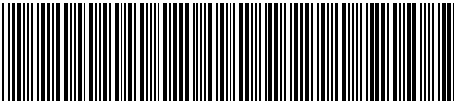
- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.11-0/2025



DS:7655-5439-0778-6753

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. UNIT ORGANISASI	:	11	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. PAGU	:	Rp.305.383.366.000	
(TIGA RATUS LIMA MILIAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)			

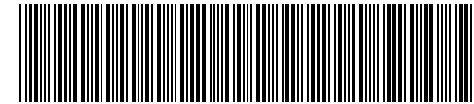
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	:	143.11.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	112.916.745
		143.11.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.576.644
		143.11.WA	Program Dukungan Manajemen	188.889.977
2. SASARAN STRATEGIS K/L	:	01	Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan	
	:	02	Meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari	
	:	03	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa didalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara	
	:	04	Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak	
3. FUNGSI	:	04	EKONOMI	229.383.366
SUB FUNGSI	:	0403	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	229.383.366
FUNGSI	:	10	PENDIDIKAN	76.000.000
SUB FUNGSI	:	1003	PENDIDIKAN MENENGAH	76.000.000
4. PRIORITAS NASIONAL	:	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	72.258.240
PRIORITAS NASIONAL	:	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3.576.644
NON PRIORITAS NASIONAL	:			229.548.482



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.11-0/2025



DS:7655-5439-0778-6753

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 3

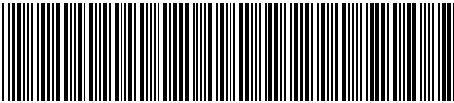
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
143.11.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		112.916.745
SP01	Meningkatkan lulusan SMK Kehutanan yang bekerja di bidang kehutanan		
IKP01	Proporsi lulusan SMK Kehutanan yang bekerja dibidang kehutanan meningkat	20 %	
SP02	Meningkatkan kualitas SDM sektor kehutanan		
IKP03	Indeks produktivitas dan daya saing SDM	90,48 Poin	
7295	Perencanaan dan Pengembangan SDM		36.916.745
01.01	Jumlah standar kompetensi SDM kehutanan yang disusun dan dikembangkan	2 Dokumen	
01.02	Jumlah SDM kehutanan bersertifikat kompetensi	1.500 Orang	
01.03	Penilaian kompetensi untuk mendukung manajemen talenta SDM kehutanan	350 Orang	
7298	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan		76.000.000
01.01	Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan Bersertifikat	458 Orang	
143.11.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		3.576.644
SP12	Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan		
IKP02	Nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan	700 Miliar Rupiah	
7294	Peningkatan Penyuluhan Kehutanan		3.576.644
01.01	Jumlah KTH yang meningkat Kemandiriannya	20 Unit	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-143.11-0/2025



DS:7655-5439-0778-6753

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
143.11.WA	Program Dukungan Manajemen		188.889.977
SP01	Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien		
7320	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		188.889.977
01.01	Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	78 Poin	
02.01	Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	3 Poin	

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Kehutanan



Raja Juli Antoni, Ph.D